UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 30 TAHUN 1997 (30/1997)
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 82.022.692.262.528 (delapan puluh dua triliun dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047
***10228** (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu

empat puluh tujuh rupiah);

b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 9.008.800.449 481 (sembilan triliun delapan miliar delapan ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

a. Penerimaan pajak sebesar Rp 48.686.292.660.915 (empat puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 16.542.298.354.653 (enam belas triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

c. Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp 7.785.300.797.479 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Rincian pendapatn negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 79.215.691.777.857 (tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 50.435.006.650.187 (lima puluh triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	48.488.465.684
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	178.886.687.840
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	23.582.615.694
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	103.936.213.159
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	28.166.471.392.261
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	218.559.836.970
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	103.371.377.457
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN ***10229** TELEKOMUNIKASI	Rp	20.633.946.232

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	8.353.111.198.915
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	150.590.435.459
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.102.571.309.788
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	207.617.313.809
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	436.065.271.217
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	10.713.400.880
15	SEKTOR AGAMA	Rp	863.299.786.937
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	260.384.786.258
17	SEKTOR HUKUM	Rp	490.141.276.116
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	2.303.623.187.716
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	923.091.629.995
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	4.469.866.517.800

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 28.780.685.127.670 (dua puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	805.316.352.978
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	890.981.117.387
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.897.035.611.915
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	139.254.676.609
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	912.411.591.452
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.382.628.459.887
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	3.111.497.593.675
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	458.204.623.115
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	6.187.566.222.622
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	439.001.025.354
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.130.382.267.391

	KELUARGA SEJAHTERA	Rp	265.578.407.620
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	987.064.029.120
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	1.037.637.402.881
15	SEKTOR AGAMA	Rp	238.419.554.100
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	431.626.300.091
17	SEKTOR HUKUM	Rp	117.350.156.864
18	SEKTOR APARTUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	624.032.324.444
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	130.645.827.545
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	1.594.051.582.620

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

***10231**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp 3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/96 menjadi sebesar Rp 6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

a. Cukup jelas

b. seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai ***10232** berikut:

RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)

Penerimaan pajak		48.686.292.660.915
0110	Pajak penghasilan (Pph)	21.012.029.564.398
0120	Pajak pertambahan nilai (PPN)	18.519.409.106.064
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	1.893.933.497.911
0210	Penerimaan bea masuk	3.029.408.339.443
0220	Penerimaan cukai	3.592.648.372.351
0230	Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor	186.068.615.463
0240	Bea meterai	329.128.446.094
0250	Bea lelang	123.666.719.191
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam		16.542.298.354.653
0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	16.054.714.886.653
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	487.583.468.000
Penerimaan bukan pajak		7.785.300.797.479
0410	Penerimaan pendidikan	49.866.785.752
0411	Uang pendidikan	46.772.116.792
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan	1.768.566.282
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek	1.084.477
0419	Penerimaan pendidikan lainnya	1.325.018.201
0480	Penerimaan pendidikan swadana	277.340.784.884
0481	Penerimaan pendidikan swadana	277.340.784.884
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	24.192.438.860
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	817.707.614
0512	Penjualan hasil peternakan	973.238.268
0513	Penjualan hasil perikanan	350.213.812
0514	Penjualan hasil sitaan	8.546.650.824
0515	Penjualan obat-obatan, dan hasil farmasi	38.454.476
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	277.221.337
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	10.225.524.552
0519	Penjualan lainnya	2.963.427.977
0520	Penjualan aset tetap	30.857.837.488
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah	10.872.924.252
0522	Penjualan kendaraan bermotor	1.526.594.513
0523	Penjualan sewa beli	15.919.140.505
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	2.539.178.218
0530	Penerimaan sewa	13.086.498.044
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.620.601.243
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	2.475.937.267
0533	Sewa benda-benda bergerak	4.724.170.478

***10233** 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.265.789.056

0540	Penerimaan jasa I	480.074.180.175
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	7.192.439.351
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	204.378.702
0543	Penerimaan surat keterangan, visa paspor dan SIM, STNK, BPKB	106.160.243.618
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	92.466.195.335
0545	Pemberian hak dan perijinan	203.925.517.912
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.421.804.186
0547	Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan	36.754.155.076
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama	4.781.261.210
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	21.168.184.785
0550	Penerimaan jasa II	248.340.488.049
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	39.557.911.096
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	149.530.402.420
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	2.721.627.881
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	10.363.416.396
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak dengan surat paksa	809.445.645
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	1.133.486.950
0559	Penerimaan jasa lainnya	44.224.197.661
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	24.411.279.670
0561	Bea visa dan paspor	--
0562	Bea konsuler	--
0563	Bea maritim	--
0564	Bea pemeriksaan	--
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	--
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	--
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	24.411.279.670
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	287.983.603.762
0581	Penerimaan penjualan swadana	2.554.683.493
0582	Penerimaan sewa swadana	4.610.244.007
0583	Penerimaan jasa swadana	tidak jelas
		tidak jelas
		tidak jelas
		tidak jelas
		tidak jelas
0614	Hasil denda, denda tilang dan	

	sebagainya		27.544.009.901
0615	Ongkos perkara		1.635.358.847
***10234** 0619	Kejaksaan dan peradilan lainnya		4.534.557.774
0710	Penerimaan dari investasi		5.410.147.627.981
0711	Bagian laba dari BUMN		1.603.937.956.343
0712	Penjualan investasi permanen		1.673.825.990.037
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)		2.132.383.681.601
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan		46.205.428.869
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat		8.848.930.638
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom		13.916.049.990
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun		14.676.377.768
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya		3.382.867.990
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya		5.381.202.483
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu		24.019.043.750
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat		7.304.653.903
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom		1.443.616.662
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun		3.866.816.244
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya		2.818.089.695
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya		8.585.867.246
0880	Penerimaan lain-lain swadana		17.540.732.659
0881	Penerimaan lain-lain swadana		17.540.732.659
0890	Penerimaan lain-lain		816.854.035.612
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji		1.139.927.412
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan		9.479.027.669
0893	Penerimaan kembali ganti rugi		5.856.034.297
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN		476.177.824.652
0899	Penerimaan anggaran lainnya		324.201.221.582
		JUMLAH	73.013.891.813.047

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)

0910	Bantuan Program	--
0920	Bantuan Proyek	9.008.800.449.481

JUMLAH 9.008.800.449.481

Pasal 2

Ayat (1)

***10235** Cukup jelas

Ayat (21)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	48.488.465.684
	Jumlah Sektor Industri	48.488.465.684
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	104.157.459.246
02.2	Subsektor Kehutanan	74.729.228.594
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	178.886.687.840
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	13.299.767.572
03.2	Subsektor Irigasi	10.282.848.122
	Jumlah Sektor Pengairan	23.582.615.694
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	103.936.213.159
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	103.936.213.159
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	47.254.780.807
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	19.404.238.805
05.4	Subsektor Keuangan	28.025.972.381.961
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	73.839.990.688
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	28.166.471.392.261
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	16.268.301.611
06.2	Subsektor Transportasi Darat	16.184.936.418
06.3	Subsektor Transportasi Laut	114.310.910.888
06.4	Subsektor Transportasi Udara	39.983.690.177
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	31.811.997.876
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	218.559.836.970
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	100.244.780.934
07.2	Subsektor Energi	3.126.596.523
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	103.371.377.457

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	11.059.530.094
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	9.574.416.138
	***10236** Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	20.633.946.232
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	8.301.977.950.386
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	51.133.248.529
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	8.353.111.198.915
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	4.283.940.124
10.2	Subsektor Tata Ruang	146.306.495.335
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	150.590.435.459
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.832.062.672.152
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	200.924.728.755
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	61.895.645.786
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	7.688.263.095
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.102.571.309.788
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	207.617.313.809
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	207.617.313.809
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	74.964.937.842
13.2	Subsektor Kesehatan	361.100.333.375
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	436.065.271.217
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	8.874.857.300
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	2.838.543.580
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	10.713.400.880

15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	133.841.394.346
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	729.458.392.591
	Jumlah Sektor Agama	863.299.786.937

***10237**

16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	176.862.749.858
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	21.970.929.672
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.082.633.172
16.6	Subsektor Informasi dan Statistik	60.468.473.556
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	260.384.786.258
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	420.474.476.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	69.666.800.116
	Jumlah Sektor Hukum	490.141.276.116
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.135.632.940.726
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	167.990.246.990
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	2.303.623.187.716
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	54.856.640.563
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	635.909.565.770
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	232.325.423.662
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	923.091.629.995
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.2	Subsektor ABRI	4.233.569.686.800
20.3	Subsektor Pendukung	236.296.831.000
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	4.469.866.517.800
	JUMLAH	50.435.006.650.187

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	619.452.353.248
	Jumlah Sektor Industri	619.452.353.248

02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	670.426.510.765
02.2	Subsektor Kehutanan	6.360.053.938
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	676.786.564.703
***10238**	03 SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	366.683.179.367
03.2	Subsektor Irigasi	748.727.628.321
	Jumlah Sektor Pengairan	1.115.410.807.688
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	121.602.436.124
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	121.602.436.124
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	18.308.731.377
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	33.898.280.415
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	366.719.194.996
05.4	Subsektor Keuangan	2.088.154.031
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	184.286.192.915
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	605.300.553.734
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.027.540.754.644
06.2	Subsektor Transportasi Darat	262.933.058.380
06.3	Subsektor Transportasi Laut	198.693.201.179
06.4	Subsektor Transportasi Udara	176.147.306.603
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	13.099.339.950
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	3.678.413.660.756
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	33.965.391.625
07.2	Subsektor Energi	791.053.791.466
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	825.019.183.091
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	37.696.578.484
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	31.231.580.341
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	68.928.158.825
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	4.895.562.418.500
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	851.774.748.985
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	5.747.337.167.485

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	205.476.063.441
10.2	Subsektor Tata Ruang	51.003.663.797
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	256.479.727.238
***10239** 11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.245.384.949.022
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	112.335.628.033
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	57.537.385.215
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	35.686.970.287
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	2.450.944.932.557
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	234.293.734.671
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	234.293.734.671
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	73.535.123.450
13.2	Subsektor Kesehatan	742.716.172.977
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	9.028.500.992
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	825.279.797.419
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	433.231.038.909
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	35.917.600.735
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	469.148.639.644
15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	78.468.075.765
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	115.649.600.210
	Jumlah Sektor Agama	194.117.675.975
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	147.025.694.309
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	28.877.520.741
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	60.133.063.355
16.4	Subsektor Kelautan	37.592.584.863
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	14.864.839.793
16.6	Subsektor Informasi dan Statistik	107.971.390.069

	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan telnologi	396.465.093.130
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	10.583.094.234
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	32.773.803.712
***10240** 17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 73.854.898.918	
	Jumlah Sektor Hukum	17.211.796.864
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	479.551.463.711
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	48.981.211.540
	Jumlah Sektor Apartur Negara dan Pengawasan	582.532.675.251
19.	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	5.127.816.494
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.490.214.122
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	73.545.111.965
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	82.163.142.581
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	2.425.000.000
20.2	Subsektor ABRI	691.995.677.205
20.3	Subsektor Pendukung	64.575.900.000
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	758.996.577.205
	JUMLAH	19.771.884.678.189

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	185.863.999.730
	Jumlah Sektor Industri	185.863.999.730
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	210.444.914.054
02.2	Subsektor Kehutanan	3.749.638.630
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	214.194.552.684
		Tidak jelas
	Jumlah Sektor Pengairan	Tidak jelas

04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	17.652.240.485
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	17.652.240.485
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
***10241** 05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	--
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	4.425.411.989
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	65.488.877.312
05.4	Subsektor Keuangan	4.530.784.181
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	232.665.964.236
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	307.111.037.718
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	986.299.113.595
06.2	Subsektor Transportasi Darat	354.644.692.673
06.3	Subsektor Transportasi Laut	272.430.119.556
06.4	Subsektor Transportasi Udara	85.007.816.123
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	5.833.057.184
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	1.704.214.799.131
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	3.907.909.000
07.2	Subsektor Energi	2.282.570.501.584
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	2.286.478.410.584
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	--
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	389.276.464.290
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	389.276.464.290
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	352.024.733.309
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	88.204.321.828
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	440.229.055.137
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	152.530.862.633
10.2	Subsektor Tata Ruang	29.990.435.483
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	182.521.298.116
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	611.783.079.900

11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	67.591.792.674
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	62.462.260
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	35.686.970.287
***10242**	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	679.437.334.834
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	31.284.672.949
	Jumlah Sektor kependudukan dan Keluarga Sejahtera	31.284.672.949
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	10.677.486.648
13.2	Subsektor Kesehatan	151.106.745.053
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	--
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	161.784.231.701
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	560.117.837.936
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	8.370.925.301
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	568.488.763.237
15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	8.884.994.561
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	35.416.883.564
	Jumlah Sektor Agama	44.301.878.125
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	12.273.675.457
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	14.886.820.033
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	941.725.966
16.4	Subsektor Kelautan	6.585.024.888
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	--
16.6	Subsektor Informasi dan Statistik	473.960.617
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	35.161.206.961
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	138.360.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	--
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	--
	Jumlah Sektor Hukum	138.360.000

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	92.330.356.279
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	3.169.292.914
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	95.499.649.193
***10243** 19.	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	8.194.676.255
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	--
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	40.288.008.709
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	48.482.684.864
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	--
20.2	Subsektor ABRI	835.055.005.415
20.3	Subsektor Pendukung	--
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	835.055.005.415
	JUMLAH	9.008.800.449.481

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas